THE INDONESIAN Forum	Seri 124 **Senin, 29 September 2025** **Rangkuman DISKUSI**

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	:	Kewargaan Digital dan Aktivisme Anak Muda: Tantangan Demokrasi ke Depan
Pemateri	:	1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) 2. Ervina Dian Irawati (Co-Founder Yayasan Pelopor Pilihan 17/Kawula17) 3. Abdulloh Masud (Perencana Ahli Madya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Moderator	:	Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Partisipan	:	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Sesi pertama diisi oleh Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute. Dalam paparannya pada The Indonesia Forum (TIF) ke-124 bertajuk *"*Kewarganegaraan Digital dan Aktivisme Anak Muda*"*, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), menyoroti bagaimana era digital membawa tantangan baru bagi demokrasi Indonesia, khususnya terkait kewarganegaraan digital dan ruang partisipasi anak muda.

Felia menjelaskan bahwa fenomena yang kini terjadi adalah matinya kepakaran dan lahirnya *influencer-aktivis*. Suara akademisi dan pakar semakin terpinggirkan karena kalah gaung dengan narasi populer yang dibawa influencer. Hal ini tidak lepas dari algoritma media sosial yang lebih mempromosikan konten viral ketimbang konten valid berbasis data. Akibatnya, aktivisme di ruang digital sering kali terjebak pada personalitas, siapa yang bicara bukan substansi atau apa yang dibicarakan.

Dalam konteks ini, Felia menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap kritis. Suara yang diangkat oleh influencer belum tentu mewakili kondisi lapangan secara utuh atau memahami akar persoalan. Oleh karena itu, publik perlu mampu memilah mana narasi yang sekadar populer dan mana yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berbasis bukti. Tanpa sikap kritis, ruang digital berpotensi menjadi ajang reproduksi bias atau bahkan disinformasi.

Lebih jauh, Felia mengingatkan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai produk akhir, disetujui atau ditolak, tetapi juga sebagai arena wacana. Kebijakan adalah ruang kontestasi makna di mana narasi tertentu dimenangkan, sementara narasi lain disingkirkan. Dengan pendekatan analisis wacana, publik bisa menelusuri siapa yang berbicara, bagaimana isu dibingkai, dan siapa saja yang didorong ke pinggiran atau bahkan dibungkam.

Menurutnya, relasi kuasa di era digital kini tidak lagi berjalan satu arah dari negara ke masyarakat, melainkan juga bergerak horizontal. Aktor-aktor baru seperti influencer, komunitas online, dan media sosial

turut menjadi pemain penting dalam menentukan arah wacana publik. Pertanyaan kritis pun muncul, siapa yang mendominasi percakapan di ruang digital, dan siapa yang justru tidak diberi ruang bersuara?

Menutup pemaparannya, Felia memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, perlunya revisi UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik. Sesuai Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, hanya korban individu yang semestinya berhak mengajukan laporan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik serta memperkuat kebebasan berekspresi. Kedua, Kemenpora didorong untuk menyederhanakan persyaratan administratif program bantuan wirausaha dan hibah kepemudaan. Prosesnya perlu lebih inklusif dengan digitalisasi pendaftaran serta penghapusan syarat yang tidak relevan agar anak muda lebih mudah mengaksesnya, seperti mengharuskan adanya surat keterangan yayasan.. Ketiga, organisasi masyarakat sipil juga perlu memperkuat strategi komunikasi mereka. Bahasa yang digunakan harus berbasis riset audiens sehingga lebih dekat dengan generasi muda. Kolaborasi dengan influencer bisa dilakukan, tetapi hanya untuk membangun kesadaran (*raising awareness*), sedangkan kerja advokasi harus tetap ditopang riset dan data yang solid.

Ervina Dian Irawati melanjutkan paparan dengan menyampaikan hasil *National Benchmark Survey (NBS) Semester I 2025* yang dilakukan oleh Kawula17. Survei ini menunjukkan tingkat aktivisme orang muda yang cukup tinggi dengan 42% berada di kategori *participant*, 35% *activist*, 10% *frontliner*, sementara hanya 13% yang tergolong *spectator*. Data ini menegaskan bahwa mayoritas anak muda Indonesia sudah tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan ikut aktif dalam merespons isu-isu sosial dan politik Ia juga menyoroti isu-isu prioritas orang muda yang paling penting di semester ini: antikorupsi (73%), HAM (59%), lingkungan (59%), dan gender (55%). Isu antikorupsi bahkan menjadi topik paling signifikan dengan lonjakan perhatian sebesar +17% dibandingkan semester sebelumnya Ervina menekankan bahwa data ini menggambarkan keresahan sekaligus optimisme orang muda dalam memperjuangkan agenda demokrasi, khususnya di tengah ruang sipil yang makin menyempit akibat pembatasan kebebasan berekspresi.

Ervina menambahkan bahwa temuan NBS harus dibaca sebagai peringatan penting bagi pemerintah. Ketidakpuasan orang muda tidak hanya terkait korupsi, tetapi juga mencakup isu pendidikan (#IndonesiaGelap), kesehatan, dan lingkungan. Fenomena protes digital dan luring, seperti #SaveRajaAmpat atau #TolakPPN12Persen, menunjukkan bahwa orang muda mampu memobilisasi suara kolektif untuk menekan kebijakan yang dianggap merugikan publik Menurutnya, tanpa kanal partisipasi yang bermakna, keresahan orang muda justru bisa bertransformasi menjadi krisis legitimasi politik.

Diskusi diakhiri dengan paparan Abdullah Mas'ud yang menjelaskan bahwa sudah ada kanal serap aspirasi digital yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Abdullah menekankan bahwa dunia digital adalah ruang hidup utama bagi generasi muda saat ini, sehingga pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari ranah ini. Ia menjelaskan bahwa Kemenpora telah mengembangkan sejumlah program untuk memperkuat literasi digital pemuda, salah satunya program Digdaya (Digital Pemuda Berdaya). Program ini tidak hanya mendorong anak muda untuk melek digital, tetapi juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan ruang digital secara positif, mengingat sisi negatif dunia maya yang juga besar.

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa Kemenpora sudah memiliki kanal formal untuk menyerap aspirasi pemuda melalui ruang digital. Salah satunya adalah *dashboard* monitoring yang ada di website resmi Kemenpora, dikelola oleh unit khusus analisis digital. Melalui kanal ini, percakapan atau aduan yang muncul di media sosial bisa terdokumentasi dan dipilah, mana yang merupakan aspirasi substansial, dan

mana yang hanya isu musiman atau viral. Aspirasi yang substansial kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadi masukan kebijakan.

Kemenpora, menurut Abdullah, juga tengah mendorong model komunikasi dua arah. Tidak sekadar sosialisasi satu arah, tapi menghadirkan forum daring tematik, kelas diskusi interaktif, hingga *town hall* digital. Dengan cara ini, anak muda bisa merasa lebih dilibatkan dan memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat secara langsung.

Selain itu, Abdullah menambahkan bahwa Kemenpora saat ini bekerja sama dengan Plan International Indonesia dalam memberikan edukasi agar anak muda dapat memanfaatkan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), secara positif dan produktif. Upaya ini diharapkan bisa mempersiapkan anak muda menghadapi dinamika dunia digital yang semakin kompleks.

Menutup paparannya, Abdullah menegaskan bahwa masukan dari peserta diskusi, termasuk rekomendasi yang disampaikan oleh Mbak Felia, akan dijadikan catatan untuk penyusunan program tahun-tahun berikutnya. Meskipun juknis (petunjuk teknis) tahun ini sudah disusun, ia memastikan bahwa evaluasi dan perubahan akan dilakukan agar akses pemuda terhadap program-program Kemenpora bisa lebih mudah dan relevan dengan kebutuhan mereka. Ia menutup dengan menyampaikan rasa syukur karena diskusi ini memberi banyak masukan penting untuk perbaikan ke depan.

FORUM DISKUSI

Tren Aktivisme Anak Muda

Pertanyaan diawali dengan proyeksi tren aktivisme anak muda: apakah isu *anti-korupsi*, lingkungan, gender, atau HAM yang akan menjadi prioritas di masa depan?

- **Ervina** menjawab bahwa berdasarkan pola historis, *anti-korupsi* masih akan kuat karena kasus OTT KPK terus muncul di publik. Isu lain yang diprediksi akan menguat adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama soal UKT dan lapangan kerja. Ia juga menambahkan bahwa *rasa takut/tidak aman* di ruang publik (misalnya takut salah bicara atau dibatasi akses buku/media) akan menjadi tren baru yang semakin terasa.
- **Moderator** menimpali bahwa rasa takut tersebut juga dialami peneliti, tapi harus diimbangi keyakinan atas proses ilmiah. Ia menggarisbawahi bahwa anak muda justru semakin kritis dan aktif mencari tahu sejarah dan kejadian politik masa lalu.

Tantangan Aspirasi Digital Anak Muda

Bagaimana memastikan aspirasi anak muda tidak hanya menjadi *tools* digital semata, tetapi juga membangun kultur partisipasi yang egaliter?

- **Abdullah Mas'ud (Kemenpora)** menjawab bahwa ini tantangan birokrasi yang sedang coba diubah. Kemenpora sudah memulai interaksi digital lewat *dashboard* aduan/respons di website resmi. Meski belum terbiasa, pembiasaan kultur digital di internal birokrasi sedang diupayakan.
- **Felia** menambahkan bahwa influencer memang penting untuk *raising awareness*, tetapi harus berkolaborasi dengan akademisi agar substansi tetap kuat. Ia menekankan perlunya membongkar kultur feodal yang membuat anak muda segan bicara, dan mendorong prinsip egaliter dalam ruang digital maupun offline.

- **Ervina** melanjutkan bahwa digitalisasi harus dipandang sebagai aset, bukan ancaman. Gerakan muda bisa cair dan cepat, sehingga organisasi masyarakat sipil harus terus beradaptasi dengan bahasa, diksi, dan ruang yang digunakan anak muda. Ia menekankan pentingnya menyediakan **ruang aman** agar generasi muda berani menyuarakan pendapat.

Pertanyaan tentang Ruang Alternatif Partisipasi Publik

Apa ruang alternatif selain digital yang bisa dipakai anak muda untuk berpartisipasi?

- Abdullah menegaskan bahwa selain kanal digital, Kemenpora mengombinasikan dengan FGD, forum konsultasi, dan organisasi kepemudaan. Ada 178 organisasi kepemudaan yang terdaftar, ditambah ribuan komunitas lain. Menurutnya, suara komunitas akar rumput harus tetap didengar, bukan hanya suara figur publik digital.

Pertanyaan tentang Perpres 80/2025

Ia menyoroti bahwa Perpres 80/2025 sudah mewajibkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis K/L, sehingga ruang formal sebenarnya ada. Tantangannya adalah implementasi: jangan sampai partisipasi hanya formalitas (sekadar hadir/absen). Ia menekankan perlunya kolaborasi masyarakat sipil dengan K/L agar partisipasi bermakna.

- **Abdullah** menanggapi dengan menyambut baik kolaborasi lintas NGO, think tank, dan pemerintah.

Perdebatan Validitas Gerakan 17+8

Pertanyaan muncul tentang apakah gerakan 17+8 valid sebagai representasi aspirasi anak muda.?

- **Felia** berpendapat bahwa validitas bukan hal utama, yang penting adalah konsistensi advokasinya. Ia mengingatkan bahwa reposting di media sosial memang dangkal, tetapi penting untuk *raising awareness* hingga akar rumput. Tantangannya adalah melanjutkan advokasi agar tidak berhenti di ruang digital.
- **Ervina** menambahkan bahwa gerakan digital seperti 17+8 memang bergerak cepat, dengan kelebihan dan kekurangan. Ia menilai repost atau *copy-paste activism* tetap punya nilai karena menunjukkan kepedulian, meski PR-nya adalah bagaimana memberi dampak nyata dan berkelanjutan.

Closing Statement

Felia Primaresti

Felia menegaskan bahwa salah satu tantangan besar generasi muda adalah rasa takut menyuarakan pendapat, yang lahir dari ketidaktahuan atau keterbatasan informasi, misalnya terkait UU ITE. Ia mendorong anak muda untuk lebih banyak membaca, berdiskusi, dan berkumpul dalam komunitas, sehingga pengetahuan bisa mengurangi ketakutan. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara influencer, akademisi, dan masyarakat sipil agar gerakan digital tidak hanya berhenti pada tren repost, tetapi berkembang menjadi advokasi yang konsisten, substansial, dan berkelanjutan.

Ervina Dian Irawati

Dian menutup dengan penekanan bahwa aktivisme digital bukan sekadar tren sementara, melainkan bentuk nyata partisipasi generasi muda dalam politik dan demokrasi. Repost, petisi online, atau diskusi digital perlu dipandang sebagai cara baru publik mengkritisi pemerintah, bukan sebagai sesuatu yang dangkal atau "nakal". Menurutnya, tugas utama semua pihak adalah menyediakan ruang aman yang benar-benar inklusif agar partisipasi digital dapat berkembang menjadi partisipasi bermakna, dua arah, egaliter, dan berkelanjutan yang menghubungkan aspirasi anak muda dengan kebijakan publik.

Abdulloh Masud

Pak Abdullah menekankan bahwa fenomena digital sudah menjadi dunia anak muda, sehingga Kemenpora harus hadir di sana bukan hanya dengan program, tetapi juga dengan membangun budaya digital yang inklusif. Ia menyampaikan bahwa Kemenpora telah menyiapkan program *Digdaya (Digital Pemuda Berdaya)* dan kanal formal aspirasi digital untuk menyerap suara anak muda. Menurutnya, tantangan terbesar birokrasi adalah beradaptasi dengan budaya baru ini, namun ia optimis bahwa kombinasi kanal digital dengan forum-forum tatap muka komunitas akan memastikan suara anak muda tidak hanya datang dari figur publik atau isu viral, tetapi juga dari akar rumput komunitas kepemudaan di seluruh Indonesia. Ia menutup dengan komitmen bahwa masukan dari forum seperti ini akan menjadi catatan penting untuk memperbaiki kebijakan ke depan.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH ~